

MINGGU, 10 JULI 2011

TUGAS MATA KULIAH DIPLOMASI DAN RESOLUSI KONFLIK INVASI NEGARA-NEGARA BARAT KE LIBYA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KONFLIK NILAI (ANTARA TIMUR TENGAH DAN

oleh Mukhamad Endry Saputra

mahasiswa Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Slamet Riyadi Surakarta

I. Konflik Negara-negara Timur Tengah sebagai Pemicu Konflik Libya

Sejak awal tahun 2011, negara-negara Timur Tengah telah mengalami masa transisi politik yang mempengaruhi stabilitas keamanan maupun politik di kawasan Timur Tengah. Rentetan gejolak politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah ini bermula dari konflik politik di Tunisia yang kemudian menyebar ke Mesir, dan kini sedang melanda Libya. Konflik di dua negara Timur Tengah, yakni Tunisia dan Mesir memiliki pola yang hampir sama dengan konflik yang tengah terjadi di Libya. Sehingga sering kali dikatakan bahwa konflik di kedua negara tersebut adalah pemicu dari konflik yang terjadi di Libya saat ini.

A. Konflik Tunisia

Konflik yang terjadi di Tunisia dipicu oleh aksi protes yang dilakukan oleh seorang pedagang kaki lima bernama Mohamed Bouazizi pada 17 Desember 2010 dengan cara membakar diri. Aksi ini dilakukannya di depan gedung pemerintahan lokal setelah dia divonis bersalah karena tidak memiliki ijin dagang yang mengakibatkan Bouzizi menjadi bangkrut dan merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup dan dirampas kebebasannya. Bouzizi terluka parah dan dibawa ke Rumah Sakit, bahkan presiden Zine El Abidine Ben Ali sempat mengunjunginya di Rumah Sakit pada tanggal 20 Desember 2010.

Lebih dari 5.000 orang bersimpati dengan kejadian ini. Terlebih setelah saudara laki-lakinya, Salem Bouazizi menyatakan bahwa kejadian yang menimpa adiknya ini adalah bentuk dari ketidakadilan yang terjadi di Tunisia. Salem menambahkan bahwa adiknya merupakan simbol perlawanan terhadap rezim yang berkuasa dan sebagai bentuk perjuangan untuk memperoleh kebebasan. *Statement* ini kemudian menjadi pengobar semangat bagi para demonstran untuk menurunkan rezim Ben Ali yang dianggap sudah terlalu lama berkuasa. Gelombang protes dari para demonstran ini berlangsung hingga awal tahun 2011 yang akhirnya mampu memaksa Ben Ali turun dari kursi kepemimpinannya.

B. Konflik Mesir

Konflik mesir bermula pada awal Februari, ketika massa mengadakan demonstrasi menuntut pengunduran diri Presiden Mubarak. Hal ini dipicu oleh pernyataan presiden Hosni Mubarak yang menyatakan bahwa dirinya tidak akan mundur dari jabatannya sebagai presiden Mesir. Pidatonya tersebut dikecam oleh lawan-lawan politiknya sebagai sesuatu yang tak pantas dilakukan di tengah aksi rakyat yang meminta dirinya mundur secepatnya. Pidato Mubarak tersebut tak mengendorkan demonstrasi rakyat Mesir yang tetap menggelar aksinya di Taman Tahrir. Gelombang protes yang terjadi di Mesir telah memakan korban tewas 300 orang dan melukai puluhan ribu lainnya. Akibat derasnya gelombang protes dari rakyat

Mesir, akhirnya presiden Hosni Mubarak bersedia lengser dari jabatannya sebagai presiden.

II. Konflik Internal Libya

Kepemimpinan diktator Muammar Khadafi yang berkuasa lebih dari 40 tahun disebut-sebut menjadi dasar pecahnya konflik internal di Libya. Kejenuhan rakyat terhadap kepemimpinan Khadafi memunculkan banyak gerakan yang menentang pemerintah (oposisi) yang menuntut Khadafi untuk turun. Aksi protes yang semakin berani ditunjukkan oleh para pejuang oposisi dengan berbagai cara mulai dari aksi damai hingga serangan untuk menduduki beberapa daerah penting di Libya.

Protes dari kelompok oposisi ini kemudian disikapi secara agresif pula oleh tentara loyalis Khadafi. Suhu politik yang semakin memanas yang disebabkan oleh semakin besarnya gelombang protes yang digulirkan kemudian memicu serangan frontal pasukan pro Khadafi terhadap pejuang oposisi dan masyarakat sipil. Pemerintah Khadafi berdalih bahwa aksi-aksi protes tersebut adalah salah satu bentuk separatisme sehingga perlu dilakukan tindakan militer untuk membendung aksi-aksi tersebut.

Sedangkan dari perspektif lain, tindakan agresif militer Libya terhadap kelompok oposisi merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan. Lebih dari 400 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka akibat bentrokan yang terjadi akibat konflik ini. Tak ayal banyak kecaman dari seluruh dunia yang ditujukan kepada Khadafi dan pasukannya terkait pelanggaran HAM tersebut.

III. Internasionalisasi Konflik Libya

Globalisasi serta kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan arus informasi di dunia semakin tidak dapat dibendung lagi. Media massa di seluruh dunia kini tak henti-hentinya memberitakan keadaan di Libya yang semakin hari semakin memburuk. Perhatian masyarakat dunia mulai tertuju pada Libya setelah serangan yang dilakukan oleh tentara loyalis Muammar Khadafi terhadap pejuang oposisi dan warga sipil yang menelan banyak korban.

Banyaknya jumlah korban yang berjatuhannya ini menimbulkan keprihatinan dan duka yang mendalam bagi masyarakat di hampir seluruh dunia. Simpati bagi para korban hingga kecaman bahkan kutukan yang dialamatkan kepada Khadafi dan tentara pendukungnya terus disuarakan. Pejuang oposisi juga terus saja menyuarakan penolakan terhadap pemerintahan Khadafi dan menuntut Khadafi untuk mundur. Alih-alih memenuhi tuntutan rakyat, Khadafi justru semakin gencar mengadakan serangan kepada para pejuang oposisi sehingga semakin banyak korban yang berjatuhannya.

Keprihatinan terhadap situasi inilah yang menyebabkan Dewan Keamanan PBB merasa perlu ikut campur dalam menangani masalah ini. Gagasan tentang perlunya keikutsertaan PBB dalam menangani konflik ini tertuang dalam resolusi Dewan Keamanan PBB yang disetujui pada tanggal 17 Maret lalu. Isi resolusi itu sendiri bertujuan menciptakan zona larangan terbang di Libya dan mandat perlindungan warga sipil. Dewan Keamanan PBB kemudian memberikan mandat kepada NATO di bawah komando Amerika Serikat untuk menindak lanjuti resolusi tersebut.

IV. Intervensi dalam Perspektif Nilai

Seperti yang kita ketahui bersama, Amerika Serikat diberikan mandat oleh PBB untuk memimpin invasi ke Libya sebagai implementasi dari resolusi Dewan Keamanan PBB. Serangan ini dimulai sejak hari Sabtu malam tanggal 19 Maret 2011

dengan tujuan untuk menciptakan zona larangan terbang dan melindungi warga sipil dari serangan pasukan pro-Khadafi.

Dari perspektif nilai, intervensi sebenarnya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia (dalam hal ini adalah hak negara untuk menyelenggarakan pemerintahannya). Personifikasi negara inilah yang kemudian seringkali disalahgunakan oleh pemimpin negara untuk melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Dengan dalih menjaga stabilitas nasional pemimpin suatu negara bisa dengan mudah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai kebebasan dan hak asasi manusia warga negaranya.

Di sisi lain, intervensi dapat dilakukan atas dasar penegakan nilai-nilai hak masyarakat sipil dalam menentukan nasib mereka sendiri terkait dengan kondisi negaranya (dalam kasus ini negara yang dimaksud adalah Libya). Argumen-argumen kemanusiaan selalu saja dapat digunakan untuk melegalkan serangan ini dengan dalih penegakan nilai-nilai hak asasi manusia. Pemerintahan Khadafi yang diktator telah mengurung kebebasan rakyat Libya selama lebih dari 40 tahun. Rakyat yang tertindas di bawah rezim Khadafi kini mulai mendapat "angin segar" yang dibawa oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu demokrasi menjadi satu-satunya solusi yang ditawarkan dan turunnya rezim Khadafi merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar lagi meskipun harus dengan pertumpahan darah. Hal ini adalah sebagai bukti bahwa konflik Libya merupakan konflik pertentangan nilai antara nilai-nilai kediktatoran yang tumbuh subur di dunia Arab dengan nilai-nilai demokrasi yang dibawa oleh Amerika Serikat.

V. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor eksternal konflik di Libya dipicu oleh konflik yang terjadi di Tunisia dan Mesir (dilihat dari pola konflik yang hampir sama).
2. Faktor internal konflik Libya adalah kejenuhan rakyat terhadap kepemimpinan Khadafi yang berkuasa selama lebih dari 40 tahun.
3. Konflik yang berkepanjangan menimbulkan kepedulian dunia internasional sehingga lahirnya resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk melindungi rakyat Libya.
4. Resolusi Dewan Keamanan PBB diimplementasikan dalam bentuk intervensi kemanusiaan dengan menggunakan kekuatan militer di bawah komando Amerika Serikat.
5. Invasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat merupakan bukti pertentangan (konflik) nilai yang terjadi antara nilai-nilai kediktatoran pemimpin di dunia Arab dengan nilai-nilai demokrasi yang dibawa oleh negara-negara Barat.

Daftar Pustaka

<http://beritaterkini.us/international/pangkalan-militer-libya-dibombardir.html>

<http://www.suryainside.com/?mod=3&idb=548>

http://indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1835:aktivis-anti-perang-menolak-invasi-ke-libya&catid=39:isu-gerakan-anti-perang&Itemid=60

<http://www.detiknews.com/read/2011/02/23/084420/1576790/10/castro-as-perintahkan-nato-invasi-libya>

<http://international.okezone.com/read/2011/03/29/414/440089/pemimpin-dunia-siap-bahas-libya-di-london>

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=275973>
<http://www.metrotvnews.com/read/newscatvideo/internasional/2011/03/20/124622/Uni-Emirat-Arab-Mendukung-Invasi-ke-Libya>
<http://www.islamtimes.org/vdcccqqe.2bqxi8f5a2.html>
<http://www.disdagtansel.com/news/item/as-perintahkan-nato-invasi-libya>

<http://konspirasi.com/peristiwa/invasi-libya-as-terancam-bangkrut/>
<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Konflik+Tunisia+dan+Mesir+dalam+Perspektif+Keselamatan+Bangsa&dn=20110202100807>
<http://biografi.gudangmateri.com/2011/01/biography-of-mohamed-bouazizi.html>
<http://konspirasi.com/peristiwa/memetakan-konflik-libya-dengan-paradigma-dari-iran/>
<http://rezasaputra.com/2011/02/penyebab-kerusuhan-di-mesir.html>
<http://indoprogress.com/2011/3/31/libya-dan-ideologi-moral-kapitalisme/>

DIPOSKAN OLEH ESAPUTRA DI 11:05

0 KOMENTAR :

POSKAN KOMENTAR

Posting LamaBeranda

Langgan: Poskan Komentar (Atom)

DAILY CALENDAR

MENGENAI SAYA



ESAPUTRA

seorang manusia yang mencoba memecahkan misteri tentang penciptaan langit, bumi, jagad raya dan seisinya.... seorang anak yang mencintai orang tuanya hingga akhir napas hidup, adik yang menyayangi kakak dan kakak yg mnyayangi adik2nya, sahabat yg selalu akan menjaga persahabatn..., seorang penikmat seni yang menjadikan seni sebagai "air"..., seorang mahasiswa HI yang concern dg perdamaian dunia, bertekad menjaga dan memeliharanya sampai akhir, fight to the brighter world with diplomacy... seorang pemimpi yg sering memimpikan kebahagiaan d setiap pergantian hari

LIHAT PROFIL LENGKAPKU

ARSIP BLOG

- ▼ 2011 (13)
 - ▼ Juli (4)
 - TUGAS MATA KULIAH DIPLOMASI DAN RESOLUSI KONFLIK I...
 - STUDI KAWASAN III: EROPA BARAT JERMAN (Federal Rep...
 - Tata Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri oleh Pemerin...
 - DIPLOMASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DI KE...
 - ► Juni (9)
- ► 2010 (2)
- ► 2009 (1)

Sejarah

Momen-Momen Penting dalam Sejarah Diplomasi Indonesia

MASA KEMERDEKAAN

1928, Oktober

Kongres Pemuda II di Jakarta melahirkan Sumpah Pemuda yang mengikrarkan satu Bangsa, Tanah Air, dan Bahasa bagi Indonesia, yang merupakan dasar dari pembentukan identitas nasional.

1945, Agustus

Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat, 17 Agustus, pukul 10 pagi di Pegangsaan Timur (sekarang Jalan Proklamasi), Jakarta.

Kabinet pertama RI dibentuk hanya dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Ahmad Soebardjo menjadi Menteri Luar Negeri pertama RI. Tanggal 19 Agustus menjadi hari berdirinya Kementerian Luar Negeri RI.

1945, September

Lapangan Gambir (kini Lapangan Monas) menjadi ajang ribuan rakyat Indonesia mendengarkan pidato Presiden Soekarno menyambut Proklamasi Kemerdekaan RI.

1946, April

Indonesia mengirimkan misi diplomatik pertamanya ke Belanda untuk berunding dengan pihak Sekutu dan Belanda.

1946, Agustus

Diplomasi bantuan beras Indonesia untuk rakyat India yang sedang dilanda bencana kelaparan. Pemerintah India membalas dengan mengirimkan obat-obatan, pakaian, dan mesin yang dibutuhkan Indonesia.

1947

"Indonesia Office" atau Kantor Urusan Indonesia didirikan di Singapura, Bangkok, dan New Delhi untuk menjadi perwakilan resmi Pemerintah RI, sekaligus menembus blokade ekonomi Belanda terhadap Indonesia.

Radio "Voice of Free Indonesia" disiarkan untuk pertama kalinya dari Yogyakarta.

1947, Maret

Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati, dimana pihak Belanda mengakui kedaulatan RI hanya sebatas Jawa, Sumatra, dan Madura.

Pemerintah Mesir yang diwakili oleh Abdul Mounem menyampaikan pengakuan resminya terhadap kemerdekaan Indonesia.

1947, Oktober

Kedatangan Komisi Tiga Negara (Committee of Good Offices) ke Indonesia, mengemban mandat Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi sengketa Indonesia - Belanda. Para anggota Komisi adalah Hakim Richard C. Kirby (Australia), mantan Perdana Menteri Paul van Zeeland (Belgia), dan Rektor University of North Carolina Dr. Frank B. Graham (AS).

1948

Mufti Agung Haji Amin El Husni berkunjung ke Indonesia untuk menyampaikan dukungan dan simpati rakyat Palestina atas perjuangan kemerdekaan Indonesia.

1948, Januari

Perjanjian gencatan senjata Indonesia-Belanda ditandatangani di atas kapal USS Renville. Mewakili pihak Indonesia adalah Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. Perjanjian Renville merupakan hasil kerja Komisi Tiga Negara (KTN).

1948, September

Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri RI Mohammad Hatta menyampaikan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri RI yang bebas dan aktif di hadapan Sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

1948

Untuk menembus blokade ekonomi Belanda, Menteri Kemakmuran RI Dr. A.K. Gani berangkat dalam sebuah misi diplomatik ke Kuba untuk mengembangkan hubungan perdagangan dengan negara-negara Amerika Latin. Pada tahun yang sama, Indonesia menandatangani kontrak dagang dengan pengusaha AS dan membina hubungan dengan Bank Dunia.

1948, Desember

Belanda menggelar agresi militer untuk kedua kalinya terhadap Indonesia. Presiden Soekarno, Wapres Moh. Hatta dan Menteri Luar Negeri Agus Salim ditangkap Belanda di ibukota Yogyakarta dan kemudian diasingkan ke Pulau Bangka, Sumatra.

Sidang Kabinet Darurat RI kemudian menunjuk Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara agar membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). A.A. Maramis yang saat itu sedang berada di New Delhi menjadi Menteri Luar Negeri PDRI.

1949, Januari

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Belanda dan Indonesia segera menghentikan segala aktifitas militer. Belanda diminta DK PBB untuk segera melepaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak awal Agresi Militer II.

Untuk membantu Indonesia yang sedang diserang Belanda, India dengan dukungan Birma menyelenggarakan Konferensi Asia mengenai Indonesia di New Delhi. Konferensi dipimpin

langsung oleh PM India Jawaharlal Nehru. Semua delegasi yang hadir saat itu, mulai dari negara-negara Asia hingga Australia dan Selandia Baru dari Pasifik, mengutuk Agresi Militer II Belanda.

Pemerintah Birma (kini Myanmar) memberikan dukungan bagi perjuangan Indonesia melawan Belanda dengan mengizinkan pesawat "Indonesian Airways" Dakota RI-001 Seulawah untuk beroperasi di Birma. Pesawat Seulawah adalah hadiah dari rakyat Aceh kepada Presiden Soekarno.

Selain itu, Birma juga memberikan bantuan peralatan radio yang memungkinkan Indonesia membangun jaringan komunikasi radio antara pusat pemerintahan RI di Jawa - PDRI di Sumatera - Perwakilan RI di Rangoon - Perutusan RI untuk PBB di New York.

1949, Juli

Konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan diantara "negara-negara federal" di Hindia Belanda, seperti: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar. Dalam Konferensi tersebut, negara-negara tersebut mendukung penyerahan tanpa syarat kedaulatan mereka kepada Republik Indonesia.

1949, Desember

Persetujuan Meja Bundar ditandatangani di Den Haag, mengakhiri konflik diantara Indonesia dan Belanda.

Pada hari yang sama (27 Desember 1949), Wakil Kerajaan Belanda menyerahkan kekuasaan formal kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta, yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Penjabat Perdana Menteri RIS.

Presiden RIS Soekarno kemudian membentuk kabinet pertamanya. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri RIS adalah Mohammad Hatta.

Amerika Serikat (AS) menjadi negara pertama yang membuka perwakilan diplomatik di Jakarta setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS, hanya tiga hari setelah Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Merle Cochran menjadi Duta Besar pertama AS untuk Indonesia. Langkah AS itu kemudian segera disusul oleh Inggris, Belanda, dan China.

MASA AWAL KIPRAH DIPLOMASI INDONESIA

1950

Dalam kunjungan ke Pakistan, Presiden Soekarno bertemu dan menyampaikan penghargaan kepada para prajurit Pakistan yang berjuang di pihak Indonesia di masa revolusi melawan Belanda.

1950, Agustus

Indonesia kembali dipulihkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1950, September

Indonesia secara resmi diterima menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB).

1950, Desember

Perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Delegasi RI dipimpin oleh Mohammad Roem. Dalam perundingan tersebut, Belanda menolak menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

1955

PM Republik Rakyat China Chou En-Lai dan Menlu RI Soenario menandatangani Perjanjian Dua Kewarganegaraan di Jakarta. PM Chou En-Lai berada di Indonesia dalam rangka menghadiri Konferensi Asia-Afrika.

1955, April

Konferensi Asia-Afrika (KAA) diselenggarakan di Bandung, tanggal 18 - 24 April. Sebanyak 29 negara dari kedua benua menghadiri Konferensi tersebut, termasuk 5 negara penggagas KAA Burma, India, Indonesia, Pakistan, dan Sri Lanka. KAA merupakan konferensi pertama yang diadakan oleh negara-negara bekas jajahan di Asia dan Afrika setelah Perang Dunia II.

KAA 1955 menandai kebangkitan bangsa-bangsa terjajah, dengan disepakatinya Dasa Sila Bandung yang menegaskan hubungan antarbangsa berdasarkan asas kemerdekaan dan keadilan.

1956

Indonesia untuk pertama kalinya mengirimkan pasukan Kontingen Garuda dalam misi penjaga perdamaian PBB di Gurun Sinai, Timur Tengah.

1956, Mei

Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang No. 13 Tahun 1956 mengenai pembatalan sepihak Uni Indonesia - Belanda, karena sikap tidak bersahabat Belanda dan penolakannya untuk menyerahkan kembali Irian Barat kepada Indonesia.

Pada tahun yang sama, Presiden Soekarno berkeliling ke negara-negara AS, China, Uni Soviet, dan Yugoslavia untuk mendapatkan dukungan bagi perjuangan merebut kembali Irian Barat.

1958, Januari

Indonesia dan Jepang menandatangani Perjanjian Perdamaian di Jakarta. Penandatanganan dari pihak Indonesia adalah Dr. Subandrio.

1959

Laili Roesad dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Belgia dan Luksemburg. Beliau adalah duta besar perempuan pertama Indonesia.

1960, Agustus

Pada tanggal 17 Agustus, Indonesia menyatakan memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan melakukan persiapan militer untuk membebaskan Irian Barat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, berbagai misi untuk mendapatkan bantuan persenjataan dikirimkan antara lain ke China, Uni Soviet, dan Yugoslavia.

1960, September

Presiden Soekarno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB ke-15 menyampaikan pidatonya yang berjudul "Membangun Dunia Baru" (To Build the World Anew).

Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menyerukan "Kekuatan Dunia Baru" (New Emerging Forces, NEFOS) untuk bangkit menuju tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang, melampaui dominasi negara-negara besar di dunia yang secara ideologis terbagi ke dalam Blok Barat dan Blok Timur.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia bertemu dengan para kepala pemerintahan Ghana, India, Mesir, dan Yugoslavia guna mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok I di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961.

1961

KTT Gerakan Non-Blok I diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia. Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Nehru dari India diutus oleh forum untuk menyampaikan hasil-hasil KTT GNB I, masing-masing ke Washington dan ke Moskow.

KTT GNB 1961 dan Konferensi Asia-Afrika 1955 mengukuhkan peranan historis RI dalam membangun suatu tatanan dunia baru untuk negara-negara berkembang berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.

1961, Desember

Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikorra) yang menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Komando Mandala dibentuk di Makassar untuk mengatur perjuangan bersenjata membebaskan Irian Barat.

1962, Agustus

Perjanjian New York ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Belanda. Menurut isi perjanjian, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Pemerintahan Sementara PBB (UN Temporary Executive Administration, UNTEA).

1963, Mei

UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Untuk memperingati perjuangan

pembebasan Irian Barat, sebuah Tugu Peringatan didirikan di Lapangan Banteng pada tanggal 18 Agustus.

1963, September

Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, menyusul pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup daerah-daerah bekas jajahan Inggris di Kalimantan Utara. Presiden Soekarno menyerukan "konfrontasi fisik" dengan Malaysia, yang menyebabkan banyak terjadinya insiden bersenjata antara tenaga sukarelawan Indonesia dengan tentara Malaysia yang dibantu Inggris, Australia, dan Selandia Baru di sepanjang daerah perbatasan di utara Kalimantan.

MASA DIPLOMASI "ORDE BARU"

1965, September

Pemberontakan kaum komunis berhasil digagalkan. Rezim Orde Baru kemudian lahir dan mengembalikan prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia ke bebas dan aktif. Pemerintahan yang baru mulai melakukan pemulihan kembali hubungan dengan negara-negara sahabat di kawasan dan di dunia internasional.

1966, Agustus

Persetujuan pemulihan kembali hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Malaysia.

1966, September

Indonesia kembali aktif dalam PBB, setelah tahun sebelumnya Presiden Soekarno menyatakan keluar dari organisasi internasional tersebut. Duta Besar L.N. Palar menjadi Wakil Tetap RI untuk PBB.

1967, Agustus

Indonesia bersama dengan Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus yang berisi kesepakatan untuk membentuk ASEAN (Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara).

1969, Juli - Agustus

Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera, "Act of Free Choice") di Irian Barat, di bawah pengawasan PBB. Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Duta Besar Ortis Sanz mendukung hasil Pepera yang sepenuhnya mendukung bergabungnya kembali Irian Barat ke Indonesia.

1969, September

Menyusul hasil pendapat rakyat Irian Barat yang sepenuhnya mendukung penggabungan kembali dengan Indonesia, Dewan Perwakilan (DPR) RI mengesahkan undang-undang Propinsi Irian Barat.

Dalam rangka mengupayakan perdamaian dan memperjuangkan kepentingan umat Islam di dunia, Indonesia turut mendirikan Organisasi Konferensi Islam (OKI/ OIC) dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Rabat, Maroko.

1971, September

Menteri Luar Negeri RI Adam Malik memimpin sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-26.

1976, Februari

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN berlangsung untuk pertama kalinya di Bali. Pada Konferensi tersebut ditandatangani "Declaration on ASEAN Concord" dan "ASEAN Treaty of Amity and Cooperation". Kantor Sekretariat ASEAN didirikan di Jakarta, dengan H.R. Dharsono dari Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal pertama.

1977, Januari

Letnan Jenderal TNI Rais Abin diangkat menjadi Panglima United Nations Emergency Forces (UNEF) II. Ini adalah pertama kalinya seorang perwira militer RI memegang jabatan puncak dalam misi penjaga perdamaian PBB.

1979

Duta Besar Titi Memet Tanuwidjaja menjadi perempuan Asia pertama yang menduduki salah

satu jabatan puncak - Direktur kawasan untuk Asia Timur dan Pakistan - di organisasi pendidikan dan kebudayaan dunia UNICEF.

1979, Juni

Pemerintah RI bekerjasama dengan Komisi Tinggi untuk Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) membuka areal seluas 170 hektar di Pulau Galang, Propinsi Riau, untuk tempat penampungan sementara dan pemrosesan para pengungsi "manusia perahu" asal Vietnam.

1980

Cendekiawan Indonesia Dr. Soedjatmoko diangkat menjadi Rektor Universitas PBB di Tokyo, Jepang.

1984, Juli

Presiden Soeharto menerima kunjungan Pemimpin Organisasi Pembebasan palestina (PLO) Yasser Arafat di Istana Merdeka. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.

1986

Duta Besar Artati Sudirdjo, Ketua Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional IAEA, memimpin Sidang Khusus Dewan mengenai kecelakaan nuklir di Chernobyl, Rusia.

Duta Besar J.B.P. Maramis menjadi orang Indonesia pertama yang mengetuai Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Pasifik (ECAFE), berkedudukan di Bangkok. Atas usulan beliau, ECAFE mengubah namanya menjadi ESCAP, sehingga menambah dimensi sosial ke dalam lembaga PBB tersebut.

1986, Juli

Presiden Soeharto menerima penghargaan dari organisasi pangan dan pertanian dunia FAO berkat prestasi Indonesia yang telah berhasil mencapai swasembada beras.

1987, Mei

Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja menerima Medali Tahun Perdamaian Internasional dari PBB.

1987, Juli

Untuk membantu penyelesaian konflik di Kamboja, Indonesia selaku wakil ASEAN dan Vietnam menyetujui diadakannya pertemuan informal antara pihak-pihak yang bersengketa di Jakarta.

1988, Juli

Pertemuan Informal Jakarta (JIM) diselenggarakan di Istana Bogor, dihadiri oleh Menlu RI, Menlu Vietnam, dan pemimpin dari keempat faksi di Kamboja.

1988, Desember

Indonesia menerima Penghargaan Kependudukan PBB.

1989, Juni

Indonesia menerima penghargaan dunia dari PBB atas keberhasilannya dalam program nasional Keluarga Berencana (KB).

1989, Desember

Indonesia dan Australia menandatangani Perjanjian Kerjasama Celah Timor yang kembali menegaskan pengakuan secara de jure Australia atas integrasi Timor Timur ke dalam Republik Indonesia.

1990

Departemen Luar Negeri RI mulai mengadakan lokakarya pengelolaan konflik berkala diantara pihak-pihak yang bersengketa di Laut China Selatan, dipimpin oleh Duta Besar Hasjim Djalal.

1990, Agustus

Indonesia dan China menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pemulihan kembali hubungan diplomatik RI - RRC pada tanggal 8 Agustus di Jakarta. Hubungan diplomatik dibekukan selama lebih dari dua dekade oleh Indonesia, menyusul pemberontakan kaum komunis yang gagal pada tahun 1965.

1990, November

Presiden RI dan Ibu melakukan kunjungan kenegaraan ke China untuk mempererat hubungan

kedua negara. Kunjungan kepala negara RI ke China tersebut merupakan yang pertama kalinya semenjak pulihnya hubungan diplomatik kedua negara. Presiden RRC Yang Shangkun kemudian melakukan kunjungan balasan ke Jakarta pada tahun 1991.

1991, Februari

Indonesia menerima penghargaan tertinggi dari organisasi kesehatan dunia WHO atas prestasinya meningkatkan kesehatan masyarakat.

1991, Oktober

Setelah melalui serangkaian pertemuan informal yang disponsori oleh Indonesia, keempat faksi yang bertikai di Kamboja akhirnya sepakat untuk menandatangani Perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober. Indonesia menjadi salah satu penandatangan dalam Perjanjian tersebut.

1992

Indonesia mulai membuka serangkaian hubungan diplomatik dengan negara-negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah, seperti Armenia, Turkmenistan, dan Azerbaijan. Georgia dan Kazakhstan menyusul kemudian.

1993, April

Indonesia memfasilitasi pertemuan informal antara Front Pembebasan Nasional Moro dan Pemerintah Filipina di Cipanas, Propinsi Jawa Barat, untuk membantu penyelesaian konflik berdarah di Filipina Selatan.

1993, Juni

Penghargaan Ibnu Sina (Avicenna Award) dianugerahkan organisasi ekonomi, sosial, dan budaya PBB UNESCO kepada Indonesia atas hasil-hasil yang telah dicapai di bidang pendidikan nasional.

1994, Juni

Indonesia kembali mendapat penghargaan internasional atas keberhasilan program KB-nya, dari Dana PBB untuk Kegiatan Kependudukan (UNFPA).

1994, Oktober

Menlu RI Ali Alatas di hadapan Sidang Majelis Umum PBB ke-49 di New York menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap reformasi PBB dan Dewan Keamanan PBB. [*/DF]